

SOSIALISASI SISTEM INFORMASI DESA DALAM MENUNJANG PELAYANAN PUBLIK

Galip Lahada¹, Karmila Akib^{2*}, Abdul Rahman³

^{1,2,3}Prodi Administrasi Publik, Universitas Sintuwu Maroso, Indonesia

karmilaakib@yahoo.com

ABSTRAK

Abstrak: Sistem Informasi Desa (SID) adalah seperangkat alat dan proses pemanfaatan data dan informasi untuk mendukung pengelolaan sumber daya di tingkat desa. Sistem Informasi Desa adalah bagian dari penerapan *e-Government* sebagaimana telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional tentang Pengembangan *E-Government*. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada para aparatur desa yang berkaitan dengan Sistem Informasi Desa untuk menunjang pelayanan publik di desa. Metode yang dilakukan adalah dengan sosialisasi melalui ceramah kemudian pengenalan pengoperasian sistem pelayanan administrasi desa berbasis web (Open SID) dan dilanjutkan dengan diskusi dan evaluasi. Mitra dalam kegiatan ini adalah Pemerintah Desa Kilo Kecamatan Poso Pesisir yang berjumlah 11 orang. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui *pre-test* dan *post-test* dengan jumlah pertanyaan sebanyak lima (5) poin, dimana hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan mitra terkait Sistem Informasi Desa khususnya sistem pelayanan administrasi desa berbasis web (Open SID) dari sebelumnya 62.5% menjadi 82.9.

Kata Kunci: Pelayanan Publik; Sistem Informasi Desa; Website.

Abstract: Village Information System (SID) is a set of tools and processes for utilizing data and information to support resource management at the village level. The Village Information System is part of the implementation of *e-Government* as mandated in Presidential Instruction Number 3 of 2003 concerning National Policy and Strategy on *E-Government* Development. The purpose of this community service activity is to provide understanding and knowledge to village officials related to the Village Information System to support public services in the village. The method used is through socialization through lectures then introduction to the operation of the web-based village administration service system (Open SID) and continued with discussion and evaluation. The partners in this activity are the Kilo Village Government, Poso Pesisir District, totaling 11 people. The evaluation of the activity was carried out through a *pre-test* and *post-test* with a total of five (5) questions, where the results of the activity showed an increase in partner knowledge related to the Village Information System, especially the web-based village administration service system (Open SID) from the previous 62.5% to 82.9.

Keywords: Public Service; Village Information System; Website.



Article History:

Received: 12-05-2025

Revised : 02-06-2025

Accepted: 12-06-2025

Online : 21-06-2025



This is an open access article under the
CC-BY-SA license

A. LATAR BELAKANG

Saat ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin cepat. Hampir semua bidang telah memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan teknologi saat ini merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dihindari, karena kebutuhan informasi yang sangat cepat dan tepat menjadi suatu hal yang utama di segala bidang. Kemajuan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial memainkan peran sentral dalam mengubah lanskap kebutuhan masyarakat (Damayanthi & Nugroho, 2023). Kebutuhan akan informasi dan pengolahan data merupakan hal yang sangat dibutuhkan dan sangat penting. Hal ini dapat terlihat, perkembangan teknologi mencakup hampir semua bidang, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan (Sugiarto dalam Yunita et al., 2022; Margareta et al., 2025).

Di bidang pemerintahan, penggunaan teknologi informasi sudah menjadikan keharusan. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Secara Elektronik di Indonesia, menuntut setiap Lembaga atau instansi publik untuk mengimplementasikan *e-government* dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik (Fitri, 2017). Pemerintahan elektronik, atau E-Government, adalah sebuah upaya yang dirancang untuk memanfaatkan teknologi dalam rangka meningkatkan mutu layanan publik kepada masyarakat (Rifdan et al., 2024). Implementasi *E-Government* meliputi beragam bidang, mulai dari transformasi digital dalam proses administrasi hingga penyelenggaraan layanan publik melalui platform daring. *E-government* membuka akses bagi masyarakat untuk memantau kegiatan pemerintahan melalui transparansi data dan informasi yang tersedia di situs resmi pemerintah, sekaligus mempercepat proses layanan publik, meminimalisir celah korupsi, serta memperkuat pengawasan internal dan partisipasi public (Kesumadewi, 2019; Apriani et al., 2025). Di Indonesia, transformasi digital melalui e-government ini tidak hanya difokuskan pada kawasan perkotaan, tetapi juga diperluas hingga ke daerah pedesaan yang memiliki peran vital sebagai basis populasi dan pilar perekonomian nasional (Kusuma et al., 2024).

Desa sebagai merupakan administratif terkecil di pemerintahan yang memiliki peran penting dalam mengurus administrasi dan kependudukan. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengamanatkan pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas tata kelola desa. Desa juga memiliki hak otonomi untuk mengatur sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakatnya termasuk terhadap proses penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah administratif desa (Rodianti et.al, 2023). Pada tingkat desa, pelayanan publik adalah layanan yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat mencakup berbagai jenis layanan seperti

Pendidikan, Kesehatan, infraskuktur jalan, listrik, air bersih dan program-program sosial lainnya. Pelayanan publik yang optimal dapat terwujud apabila pemerintahan desa dikelola secara profesional, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Kasmawanto, 2023). Peningkatan kualitas layanan publik di desa bergantung pada penguatan kelembagaan, partisipasi masyarakat, regulasi adaptif, sinergi antarpemerintah, dan integrasi digital. Dukungan finansial serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan juga penting untuk menjamin implementasi yang efektif dan berdampak (Kusuma et al., 2024).

Untuk dapat mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas desa dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Di era digital seperti sekarang, transformasi di tingkat pemerintahan desa merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari (Alhari et al., 2024; Aidin 2025; Kusuma et al., 2024). Salah satu teknologi yang paling berkembang adalah teknologi yang berbasis web yang sering disebut dengan internet. Teknologi ini sudah digunakan di berbagai bidang baik bisnis, pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Teknologi internet yang kini sudah mendarah daging harus dimanfaatkan secara optimal, keberadaan teknologi diharapkan juga bisa menjadi jawaban untuk menyamaratakan kecepatan pelayanan, sebuah kemajuan jika pemerintah mulai mengadopsi teknologi tersebut sebagai infrastruktur utama pelayanan publik (Muhammad, 2018 ; Irfan, 2024; Margareta et al., 2025).

E-Government adalah aplikasi teknologi dan informasi yang berbasis internet (web) dan perangkat lainnya yang dikelola oleh pemerintah yang berguna untuk penyampaian informasi (Atthahara, 2018). Pentingnya *e-government* salah satunya didasari atas kebutuhan pemerintahan yang transparan dan tuntutan akan perubahan jaman yang semakin maju. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik yang cepat, tepat dan murah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (Kurnia et al., 2023). Salah satu strategi pemerintah pusat dalam menyusun *e-Government* adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal. Sistem Informasi Desa adalah bagian dari penerapan *e-government* sebagaimana telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional tentang Pengembangan *e-government* (Akbar & Sensuse, 2018; Rahmawati & A. Tyas, 2020; Rahayu et al., 2021; Aidin, 2025).

Sistem Informasi Desa (SID) adalah seperangkat alat dan proses pemanfaatan data dan informasi untuk mendukung pengelolaan sumber daya berbasis komunitas di tingkat Desa (Rodianto et.al, 2023). Kepala desa sebaiknya menghadirkan sistem informasi desa untuk masyarakat yang memiliki perkembangan teknologi yang mampu dipergunakan untuk membangun desa dan masyarakat dari keadaan yang kurang baik menjadi

keadaan lebih baik (Khaerunnisa & Nofiyati, 2020). Keberadaan sistem informasi desa menjadi sangat penting karena masyarakat desa membutuhkan akses informasi yang update terhadap perkembangan informasi baik untuk pelayanan maupun informasi transparansi penggunaan dana desa dan informasi terkait perkembangan desa serta media promosi pariwisata yang memiliki potensi wisata kepada pihak eksternal (Putra et al., 2022). Sistem informasi desa dapat meningkatkan pemanfaatan potensi masyarakat dengan menyajikan data profil warga yang terpusat karena melalui pembuatan situs web memungkinkan pemerintah kabupaten/kota melakukan pendataan komprehensif terhadap seluruh potensi daerah, termasuk sumber daya manusia, sektor ekonomi, serta ragam kegiatan social (Ulfa et al., 2024).

Sistem Informasi Desa memberikan banyak manfaat bagi desa, kabupaten, dan provinsi dalam berbagai tujuan seperti (1) mempermudah kerja desa untuk dapat menyimpan, mengelola, menyajikan, dan mempublikasikan data dan informasi desa; (2) mengefisienkan urusan pemerintahan desa, termasuk menyusun laporan pertanggungjawaban pelaporan dana desa dan memberi kemudahan dalam pelayanan publik, seperti layanan administrasi; (3) mendukung proses perencanaan secara akurat berbasis bukti di desa; dan (4) memfasilitasi kabupaten dan provinsi dalam memanfaatkan data yang disediakan desa untuk penyusunan perencanaan pembangunan kabupaten dan provinsi (Budiman, 2021). Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Thanos & Achjari (2021) bahwa sistem informasi desa memiliki berbagai kegunaan, termasuk administrasi data penduduk, perencanaan dan pelaporan kegiatan desa, pengelolaan inventaris aset dan infrastruktur desa, serta penyelenggaraan layanan publik dan fungsi pendukung lainnya.

Namun dalam pelaksanaannya Sistem Informasi Desa ini menemui banyak kendala. Banyak desa di Indonesia yang belum memanfaatkan Sistem Informasi Desa ini dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di desa. Faktor internal dalam penerapan SID adalah kurangnya kelengkapan data administrasi desa dalam membangun sistem informasi desa, lemahnya sumber daya manusia desa dalam mengelola dan mengembangkan sistem informasi desa, kurangnya perhatian masyarakat desa mengenai informasi pembangunan di desa, aplikasi sistem informasi yang diberikan kepada pemerintah desa atau yang dikembangkan di desa tidak sesuai dengan karakteristik desa. Di antara faktor eksternal adalah ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menyiapkan sistem informasi di desa (Karimullah et al., 2022; Kusuma et al., 2024; Rahayu et al., 2021; Aidin, 2025).

Hal ini juga yang terjadi pada mitra pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini yaitu Pemerintah Desa Kilo Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso. Permasalahan yang dialami mitra adalah belum memanfaatkan Sistem Informasi Desa dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Proses pelayanan masih dilakukan

secara konvensional atau manual seperti pendataan kependudukan desa, arsip pembukuan khususnya surat menyurat dan belum adanya sistem informasi berbasis aplikasi. Hal ini tentu saja berdampak pada aparat desa dan masyarakat. Pelayanan publik kadang menjadi terhambat.

Berdasarkan pada analisis situasi dan identifikasi permasalahan yang dialami oleh mitra pada pengabdian kepada masyarakat, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada para aparat Desa Kilo tentang Sistem Informasi Desa yang pada akhirnya dapat memanfaatkan dan mengalokasikan anggaran untuk mengimplementasikan sistem informasi berbasis aplikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa.

B. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi Desa (SID) dalam Menunjang Pelayanan Publik di Desa Kilo Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2024. Sosialisasi itu dilaksanakan di Aula Kantor Desa Kilo yang melibatkan mahasiswa KKNT Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sintuwu Maroso Angkatan IV Tahun 2024. Mitra dalam kegiatan ini adalah Pemerintah Desa Kilo Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso yang berjumlah 11 orang. Adapun kegiatan tersebut dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Persiapan

Pada tahap ini ada beberapa hal yang dilakukan, diantaranya yaitu melakukan koordinasi internal dengan tim untuk merencanakan pelaksanaan kegiatan dan membagi tugas kepada masing-masing anggota. Pada tahap ini ada beberapa hal yang dilakukan, diantaranya yaitu melakukan koordinasi internal dengan tim untuk merencanakan pelaksanaan kegiatan dan membagi tugas kepada masing-masing anggota. Koordinasi internal dengan tim dilakukan melalui diskusi dan menyusun rencana kegiatan yang mencakup penentuan tujuan kegiatan, menetapkan peserta dan lokasi kegiatan serta menetapkan strategi pelaksanaan agar sesuai dengan rencana. Selain itu juga menyusun jadwal, tanggal dan waktu pelaksanaan. Kemudian untuk pembagian tugas kepada masing-masing anggota yaitu masing-masing anggota tim diberikan tanggung jawab seperti menyiapkan administrasi kegiatan, menentukan narasumber, mengatur logistik dan dokumentasi, melakukan koordinasi dengan pihak terkait, serta menyiapkan materi, bahan dan perangkat kegiatan.

2. Pelaksanaan Kegiatan

Adapun tahapan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini adalah

- a. Evaluasi Pemahaman yaitu memberikan pre-test kepada mitra untuk mengetahui tingkat pemahaman mitra terkait Sistem Informasi Desa (SID);

- b. Ceramah yaitu penyajian dan penjelasan materi tentang Sistem Informasi Desa (SID); kemudian dilanjutkan dengan materi sistem pelayanan administrasi desa berbasis web (Open SID) yang digunakan oleh beberapa instansi penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten Poso yang dapat diimplementasikan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- c. Diskusi terkait materi yang telah diberikan serta mendengarkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas aparat desa pelayanan publik.

3. Evaluasi Kegiatan

Pada tahap ini dilakukan dengan melihat keseriusan aparatur desa dalam memahami Sistem Informasi Desa (SID). Untuk mengukur tingkat ketercapaian kegiatan sosialisasi tentang Sistem Informasi Desa (SID) dalam Pelayanan Publik dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan *post-test*, seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahap Persiapan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diawali dengan tahap persiapan, meliputi pembentukan tim, penentuan tema, dan pemilihan lokasi. Setelah tim terbentuk kemudian dilakukan koordinasi internal dengan tim untuk merencanakan pelaksanaan kegiatan dan membagi tugas kepada masing-masing anggota. Selanjutnya penentuan tema dan lokasi ditetapkan berdasarkan identifikasi masalah di daerah sasaran. Survei dilakukan oleh Tim PKM pada tanggal 4 Oktober 2024 di Desa Kilo Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso. Setelah berdiskusi dengan Pemerintah Desa Kilo maka ditetapkan tema kegiatan tentang Sistem Informasi Desa dengan jadwal pelaksanaan kegiatan pada Sabtu 12 Oktober 2024. Selanjutnya, tim menyiapkan administrasi dan perlengkapan kegiatan, termasuk perizinan lokasi, pemilihan narasumber, serta koordinasi dengan berbagai pihak. Koordinasi dilakukan bersama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sintuwu Maroso, serta Pemerintah Desa Kilo sebagai mitra pelaksana kegiatan ini. Selain itu juga, tim mempersiapkan materi yang akan disampaikan, bahan dan perangkat kegiatan yang akan digunakan serta

mempersiapkan kuesioner untuk alat evaluasi dari hasil PKM yang akan dilaksanakan.

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Sistem Informasi Desa (SID) menjadi sarana efektif bagi perangkat desa untuk memperlancar penyebaran informasi sekaligus mengoptimalkan pemetaan potensi desa. Sebagai suatu sistem, SID berperan sebagai alat yang mendukung pemerataan informasi dari dan ke desa sehingga optimalisasi penggunaannya penting, baik untuk kebutuhan internal guna menyelesaikan persoalan masyarakat desa maupun untuk membangun jaringan eksternal guna mempromosikan dan mengembangkan potensi desa secara lebih luas (Rodianto et al., 2023).

Namun kebutuhan akan penggunaan sistem informasi desa yang semakin berkembang pesat tidak dibarengi oleh tenaga-tenaga profesional yang mampu membuat atau menjalankan system tersebut. Padahal Sistem informasi memegang peran penting dalam mendukung layanan administrasi yang diperlukan masyarakat di tingkat pemerintahan desa (Rodianto et al., 2023). Untuk itu diperlukan pelatihan atau sosialisasi sistem informasi desa yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan aparat desa dalam pengoperasian sistem informasi desa yang nantinya dapat diaplikasikan dengan berbagai kebutuhan di desa.

Kegiatan sosialisasi sistem informasi desa pada Desa Kilo Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso ini dilakukan selama satu (1) hari. Kegiatan sosialisasi ini diawali dengan sambutan yang langsung diberikan oleh Kepala Desa Kilo. Selanjutnya pelaksanaan *pretest* dengan hasil rekapitulasi nilai rata - rata sebesar 62,5. Sesi selanjutnya yaitu kegiatan sosialisasi yang langsung disampaikan narasumber dengan materi Sistem Informasi Desa (SID). Kemudian pengenalan pengoperasian sistem pelayanan administrasi desa berbasis web (Open SID), seperti terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan

Gambar 2 di atas, peserta kegiatan diberikan materi tentang sistem pelayanan administrasi desa berbasis web (Open SID) dan ada beberapa hal

yang dipelajari peserta seperti bagaimana menambahkan data penduduk dimana peserta diberikan panduan mengenai cara memasukkan serta memperbarui data penduduk secara digital sehingga data kependudukan desa dapat tercatat dengan akurat dan dikelola secara optimal. Kemudian memonitoring data statistik kependudukan, dimana peserta diajarkan cara mengakses serta memantau data statistik penduduk secara langsung yang sangat berguna untuk mendukung perencanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di desa, serta mempelajari sistem pengajuan surat menyurat di desa dimana peserta diajarkan proses pengelolaan pengajuan surat seperti, surat keterangan, dan dokumen administratif lainnya melalui sistem *online*. Dengan sistem ini, masyarakat dapat mengajukan permohonan surat dengan lebih mudah, sementara aparat desa dapat menjalankan proses administrasi dengan lebih efisien dan transparan.

Selanjutnya Untuk lebih memperdalam kembali pemahaman peserta, diakhir presentasi kami memberi kesempatan kembali kepada peserta untuk memberikan pertanyaan dan mendiskusikan kembali letak ketidaktahuan k peserta, mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang selama ini mereka alami, setelah itu tim pengabdian memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut dan memberikan solusi atas permasalahan yang dialami oleh peserta.

3. Tahap Evaluasi

Evaluasi kegiatan pengabdian ini ini dilakukan dengan beberapa cara, yakni evaluasi terhadap proses dan evaluasi terhadap hasil pelatihan. Evaluasi terhadap proses pelaksanaan pengabdian ini dapat dilihat dari keseriusan dan ketekunan para peserta yaitu aparatur Desa Kilo dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya sistem informasi desa. Kemudian evaluasi terhadap hasil pelatihan dilihat dari hasil *posttest* yang dilakukan.

Setelah dilakukannya sosialisasi kepada aparatur desa mengenai sistem informasi desa, tim pengabdian kembali melakukan *posttest* dengan hasil yang diperoleh pada *posttest* ini adalah nilai rata-rata sebesar 82,9. Pengetahuan mengenai Sistem Informasi Desa meningkat dari nilai rata-rata *pre-test* 59,375 menjadi 78,125 pada *post-test*, dengan kenaikan sebesar 18,75 poin, yang menunjukkan peningkatan pemahaman peserta tentang SID. Kemudian pemahaman tentang internet juga mengalami peningkatan, meskipun kecil, dari 93,75 pada *pre-test* menjadi 98,875 pada *post-test*, menandakan peserta sudah memiliki pengetahuan yang cukup baik sejak awal. Selanjutnya untuk pertanyaan pengetahuan tentang Website Desa meningkat signifikan, dari 56,25 pada *pre-test* menjadi 81,25 pada *post-test*, dengan kenaikan 25 poin, menunjukkan peningkatan pemahaman yang nyata. Untuk pertanyaan pemahaman mengenai isi website desa naik dari 50 menjadi 75, bertambah 25 poin, selanjutnya untuk pengetahuan tentang manfaat website desa juga bertambah, dari 53,125 pada *pre-test* menjadi

81,25 pada *post-test*, meningkat sekitar 28 poin. Secara keseluruhan, rata-rata nilai *pre-test* peserta adalah 62,5 yang kemudian naik menjadi 82,9 pada *post-test*, menunjukkan peningkatan pengetahuan total sekitar 20,4 poin setelah pelatihan, hal ini dapat lihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Penilaian Pre Test dan Post Test

No.	Materi Sosialisasi	Evaluasi	
		Pre Test	Post Test
1	Pengetahuan ttg SID	59.375	78.125
2	Pengetahuan ttg Internet	93.75	98.875
3	Pengetahuan ttg Website Desa	56.25	81.25
4	Pnegetahuan ttg Isi Web Desa	50	75
5	Manfaat ttg Web Desa	53.125	81.25
	%Rata-rata	62.5	82.9

4. Kendala yang Dihadapi

Selama pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini, kendala yang dihadapi adalah jaringan internet yang tidak stabil di Desa Kilo sehingga ketika tim mengenalkan pengoperasian sistem pelayanan administrasi desa berbasis web (Open SID) menjadi terhambat. Solusi yang dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat adalah dengan menyediakan modem portabel dengan provider berbeda juga dengan membuat materi dalam bentuk offline berupa PDF yang dapat diakses tanpa internet.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan sosialisasi Sistem Informasi Desa kepada Aparat Desa Kilo Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso ini telah berjalan sesuai dengan perencanaan. Dari kegiatan tersebut ada beberapa hal yang dapat disimpulkan yaitu sebelum kegiatan sosialisasi ini dilakukan para aparat Desa Kilo belum mengetahui dan memahami tentang Sistem Informasi Desa, Website Desa serta manfaat website desa dalam kegiatan pelayanan publik di desa. Setelah kegiatan sosialisasi dilaksanakan pihak mitra yaitu aparat Desa Kilo telah mengetahui dan memahami tentang Sistem Informasi Desa dalam kegiatan pelayanan publik. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan adanya peningkatan pengetahuan peserta terkait sistem informasi desa dan manfaatnya dari sebelumnya 62.5% menjadi 82.9%. Dengan sistem informasi desa maka aparatur pemerintahan dapat dengan mudah memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Masyarakat dapat dengan mudah untuk memperoleh informasi dan mendapatkan layanan secara cepat. Untuk itu disarankan agar sosialisasi dan pelatihan tentang Sistem Informasi Desa ini terus dilakukan agar pengetahuan dan pemahaman tentang Sistem Informasi Desa dapat ditingkatkan secara menyeluruh demi meningkatkan kualitas layanan

publik di semua desa. Selain perangkat desa, masyarakat juga perlu diberikan sosialisasi mengenai manfaat Sistem Informasi Desa dan layanan yang disediakan sehingga masyarakat dapat lebih memahami dan dapat memanfaatkan layanan tersebut, dan pada akhirnya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana atas dukungan dan kerjasama berbagai pihak. Oleh karenanya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemerintah Desa Kilo Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sintuwu Maroso Poso dan mahasiswa peserta KKNT Angkatan IV Jurusan Administrasi Publik yang membantu terselenggaranya kegiatan ini.

DAFTAR RUJUKAN

- A.K Kesumadewi. (2019). Penerapan E-Government Di Indonesia Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi. *Wacana Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *VI*(1), 101–116.
- Aidin, M. (2025). Transformasi Digital Administrasi Desa Melalui Sistem Informasi Desa: Kajian Pustaka Tentang Faktor Pendukung Dan Penghambat. *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science*, *2*(8), 1661–1674.
- Akbar, A., & Sensuse, D. I. (2018). Pembangunan Model Electronic Government Pemerintahan Desa Menuju Smart Desa. *Jurnal Teknik Dan Informasi*, *5*(1), 1–5.
- Alhari, Muhammad Ilham, Alvianto, F. B., Chandra, A., & Rizkia, D. (2024). *Perancangan IT Blueprint Sebagai Strategi Pengembangan Konsep Smart Village konsep smart village yang berfokus pada dimensi e-government dengan*. *8*(6), 4–12.
- Ambar Aditya Putra, A., Widakdo, D. T., & Sasmita, R. F. (2022). Sosialisasi Sistem Informasi Desa Berbasis Web (Open Sid) Pada Desa Jati Indah Tanjung Bintang Lampung Selatan. *Abdimas Toddopuli: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, *4*(1), 21–28. <https://doi.org/10.30605/atjpm.v4i1.1966>
- Apriani, E., Manaf, P. K., & Ramadani, V. R. (2025). *Digitalisasi Sebagai Solusi untuk Mengurangi Korupsi di Sektor Pelayanan Publik*.
- Atthahara, H. (2018). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government: Studi Kasus Aplikasi Ogan Lopian Dinas. *Jurnal Politikom Indonesiana*, *3*(1), 66–77.
- B, I. (2024). Studi Literatur Tentang Integrasi Digital Dalam. *Trajectories of Public Administration*, *1*(3), 1–11.
- Budiman, V. (2021). *Panduan Fasilitasi Replikasi dan Pelembagaan Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID)*. 1–34.
- Elvira Thanos, D. A. (2021). Analisis Manfaat Penerapan Sistem Informasi Desa Di Kabupaten Bantul. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, *9*(4). <https://doi.org/10.22146/abis.v9i4.70393>
- Et.al, R. (2023). Sosialisasi Sistem Informasi Desa (Open Sid) Dalam Menunjang Pelayanan Masyarakat Pada Desa Marga Karya. *J-PRES (Jurnal Pengabdian Rekayasa Sistem)*, *1*(2), 25–28.
- Karimullah, A., Maulany, R. R., & Amiruddin, M. (2022). Problematika Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) di Indonesia. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, *3*(4), 335–351. <https://doi.org/10.15642/mal.v3i4.134>

- Kasmawanto, Z. (2023). Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Efektif di Desa Pucangro. *MADANI Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 15(3), 465–477.
- Khaerunnisa, N., & Nofiyati, N. (2020). Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Web Studi Kasus Desa Sidakangen Purbalingga. *Jurnal Teknik Informatika (Jutif)*, 1(1), 25–33. <https://doi.org/10.20884/1.jutif.2020.1.1.9>
- Kurnia, C., Posumah, J. H., & Plangiten, N. N. (2023). christy+kurnia_JAP_2023_4. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(4), 489–496.
- Kusuma, T. C., Aris, U., Pranacitra, Resi, Suriyanto, & Dewanto, W. (2024). Smart Governance: Program Ransformasional Digital Nasional Melalui Desa , Siapkah. *Iblam Law Review*, 4(2).
- Margareta, Vienessa, A., Naya, D., & Meni, R. (2025). Tarakan Smart City: Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Layanan Publik melalui E-Government. *Tumoutou Social Science Journal (TSSJ)*, 2(1), 61–73.
- Mira Yunita, A., Sugiarto, A., Rizky, R., Susilawati, Hakim, Z., & Nailul Wardah, N. (2022). Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Desa dengan Penerapan e-Surat Berbasis Web di Desa Sukacai Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 7(1), 188–193. <https://doi.org/10.30653/002.202271.31>
- Mukmin Muhammad. (2018). *Sosialisasi "Sistem Informasi Desa Berbasis Open Source Dan Closed Source."*
- R.Fitri, A. N. A. & A. S. B. N. (2017). Pengembangan Sistem Informasi Desa Untuk Menuju Tata Kelola Desa yang Baik (Good Governance) Berbasis TIK. *Positif*, 3(2), 99–105.
- Rahayu, A. D., Lestari, H., & ... (2021). Efektivitas Sistem Informasi Di Desa Purwogondo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. *Journal of Public Policy ...*, 10(4), 113–129.
- Rahmawati, W., & Zahra Arwananing Tyas. (2020). Pengembangan Sistem Informasi Desa untuk E Government di Desa Girikerto. *SEMINAR NASIONAL Dinamika Informatika*, 143–147.
- Rifdan, Haerul, Sakawati, H., & Yamin, M. N. (2024). Analisis penerapan e-government dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan tallo kota makassar. *Jurnal Governance and Politik (JPG)*, 4, 49–61.
- Ulfa, F., Sintiya, E. S., Affandi, L., Rahmanto, A. N., Arief, S. N., & Pratama, A. F. (2024). *Digitalisasi pelayanan rw melalui pengembangan website berdasarkan potensi warga*. 8(6), 3–12.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa